



# **Dana Desa Pendorong Sistem Perekonomian Indonesia Baru yang Mengacu pada Keunggulan Kompetitif sebagai Barometer Perubahan Sistem Perekonomian Dunia**

Oleh :

**Tatan Jaka Tresnajaya dan Aniek Juliarini \*)**

Widyaiswara Balai Diklat Keuangan (BDK) III Yogyakarta

**Abstrak :** Perkembangan perekonomian di dunia mengharuskan setiap negara berusaha melindungi kepentingan rakyatnya dengan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk Indonesia. Menyikapi perkembangan tersebut perlu dilakukan sistem perekonomian Indonesia yang diselaraskan dengan kondisi keterkinian dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pengucuran dana satu milyar rupiah untuk setiap desa. Kebijakan ini merupakan pendorong sistem perekonomian baru yang dapat menjadi kekuatan pemerintah membangun perekonomian dimulai dari kemandirian desa memanfaatkan keunggulan sumber daya yang dimiliki di setiap daerah. Dengan wilayah yang kecil dan hubungan antar warga desa atau kelurahan maupun masyarakat dengan pemerintah desa yang lebih dekat maka sangat memungkinkan dibangunnya sebuah sistem ekonomi dengan semangat kegotongroyongan masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** Sistem perekonomian , dana desa, keunggulan kompetitif

Koresponden : Tatan J Tresnajaya, E-mail: [tatan.tresnajaya@gmail.com](mailto:tatan.tresnajaya@gmail.com),

## **Pendahuluan**

Perkembangan perekonomian di dunia mengharuskan setiap negara berusaha melindungi kepentingan rakyatnya dengan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi yang kini telah mencapai tujuh paket. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yang diluncurkan pada bulan September 2015 adalah sebagai berikut (Kompas, Kamis 10 September 2015):

Pemerintah:

- a. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan kepastian usaha.
- b. Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya.
- c. Meningkatkan investasi di bidang property, memperbanyak peluang diversifikasi.

Bank Indonesia (berkoordinasi dengan Otoritas Jaka Keuangan):

- a. Memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisi suplai perekonomian
- b. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.
- c. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah.
- d. Memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing.
- e. Melakukan langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang.

Sementara itu nilai kurs terkini dan posisi hutang Luar Negeri Indonesia baik sektor pemerintah maupun swasta adalah sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kurs Dollar Amerika terhadap Rupiah.

Kurs USD / IDR (nilai tukar Dollar terhadap Rupiah)

TANGGAL	ASK	BID
10 September 2015	14,394.00	14,250.00
9 September 2015	14,315.00	14,173.00
8 September 2015	14,356.00	14,214.00
7 September 2015	14,305.00	14,163.00
5 September 2015	14,249.00	14,107.00

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Dari Tabel 1 tampak bahwa nilai rupiah terus mengalami penurunan pada tanggal 5 September sampai 8 September, sedikit menguat pada tanggal 9 September, namun langsung turun cukup jauh lagi pada 10 September 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lemah daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional.

Tabel 2. Posisi utang Indonesia tahun 2010—2014.

### Posisi Utang Berdasarkan Kreditor

NEGARA	2010	2011	2012	2013	2014	Per 30 Juni 2015 *)	
						Nominal	% Total
<b>A. PINJAMAN</b>	<b>617.25</b>	<b>621.29</b>	<b>616.61</b>	<b>714.44</b>	<b>673.71</b>	<b>692.94</b>	<b>24.2%</b>
- Pinjaman Luar Negeri	616.86	620.28	614.81	712.17	670.80	689.38	24.1%
<b>1. BILATERAL</b>	<b>380.67</b>	<b>381.66</b>	<b>359.80</b>	<b>383.53</b>	<b>332.22</b>	<b>334.49</b>	<b>11.7%</b>
a. Jepang	274.47	280.45	256.10	254.71	210.78	211.64	7.4%
b. Perancis	21.88	20.90	21.30	25.94	24.63	24.79	0.9%
c. Jerman	22.65	20.29	20.00	23.71	21.33	19.96	0.7%
d. Lainnya	61.68	60.02	62.39	79.17	75.47	78.10	2.7%
<b>2. MULTILATERAL</b>	<b>208.28</b>	<b>212.96</b>	<b>230.23</b>	<b>288.29</b>	<b>292.01</b>	<b>307.04</b>	<b>10.7%</b>
a. Bank Dunia	102.23	108.73	122.53	163.77	174.86	187.16	6.5%
b. ADB	100.40	97.92	100.37	114.58	107.36	109.14	3.8%
c. IDB	3.76	4.23	5.09	7.22	7.23	8.07	0.3%
d. Lainnya	1.89	2.09	2.24	2.73	2.56	2.67	0.1%
<b>3. KOMERSIAL BANK</b>	<b>27.34</b>	<b>25.15</b>	<b>24.37</b>	<b>40.00</b>	<b>46.34</b>	<b>47.65</b>	<b>1.7%</b>
<b>4. SUPPLIERS</b>	<b>0.57</b>	<b>0.50</b>	<b>0.41</b>	<b>0.35</b>	<b>0.24</b>	<b>0.21</b>	<b>0.0%</b>
- Pinjaman Dalam Negeri	0.39	1.01	1.80	2.27	2.91	3.56	0.1%
<b>B. SURAT UTANG NEGARA</b>	<b>1,064.40</b>	<b>1,187.66</b>	<b>1,361.10</b>	<b>1,661.05</b>	<b>1,931.22</b>	<b>2,171.24</b>	<b>75.8%</b>
Denominasi Valas **)	161.97	195.63	264.91	399.40	456.62	554.29	19.4%
Denominasi Rupiah	902.43	992.03	1,096.19	1,261.65	1,474.60	1,616.95	56.5%
<b>TOTAL UTANG</b>	<b>1,681.66</b>	<b>1,808.95</b>	<b>1,977.71</b>	<b>2,375.50</b>	<b>2,604.93</b>	<b>2,864.18</b>	<b>100.0%</b>

Catatan:

\*) Angka sementara.

\*\*) Termasuk SUN Valas Domestik

Kementerian Keuangan - Republik Indonesia

Sumber : <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/index.php/page/load/21>

Dari Tabel 2 terlihat bahwa utang Indonesia sejak tahun 2010—2014 terus mengalami peningkatan yakni 7,6%, 9,34%, 20,07% dan 9,6%. Dengan demikian maka pertumbuhan rata-rata 9,4% per tahun. Utang tahun 2014 meningkat 54,88 % dari tahun dasar 2010.

Posisi hutang luar negeri dan nilai kurs USD tersebut menjadi tantangan bagi pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini rakyat untuk membuat tindakan nyata yang terencana dan terkontrol serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dari berbagai pengelompokan, eksekutif, legislatif, juga yudikatif. Kita harus melihat kondisi terkini sebagai peluang bagi Indonesia untuk memberi contoh kepada dunia dengan membentuk sistem ekonomi baru berbasis keunggulan kompetitif dari berbagai sektor yang dimiliki Indonesia. Sudah tentu kita harus bersama-sama menjalankannya dengan mengesampingkan terlebih dahulu kepentingan individu, kelompok, dan golongan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai pengamat ekonomi sudah mulai mengonsepan ekonomi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Kebanyakan dari mereka menggolngkannya menjadi dua konsep yaitu sistem ekonomi kerakyatan dan sistem ekonomi liberal. Dengan adanya konflik ini banyak sekali bermunculan pendapat-pendapat yang pro dan kontra mengenai sistem apa yang seharusnya diterapkan di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pengucuran dana satu milyar rupiah untuk setiap desa. Hal ini merupakan potensi dan sumber kekuatan pemerintah desa untuk membangun perekonomian yang mandiri bagi wilayahnya. Dengan wilayah yang kecil dan hubungan antar warga desa maupun masyarakat dengan pemerintah desa yang lebih dekat maka sangat memungkinkan dibangunnya sebuah sistem ekonomi dengan semangat kegotongroyongan masyarakat Indonesia, empat puluh enam trilyun lebih dana desa dalam RAPBN 2016 dan 20 trilyun lebih untuk tahun 2015 yang hendaknya dioptimalkan.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dilahirkan sistem ekonomi baru yang tidak hanya tergantung dengan paradigma dua sistem yang relatif seolah bertentangan tersebut. Sistem yang dibangun bukan berarti medeskreditkan sistem yang selama ini terlebih dahulu populer, tetapi sistem perekonomian yang akan menjadikan kekuatan baru bagi Indonesia berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan dana desa?
2. Apa sistem ekonomi baru yang tepat diterapkan di Indonesia ?

### **Tujuan dan Manfaat**

1. Menganalisis metode optimalisasi pengelolaan dana desa
2. Merumuskan sistem ekonomi baru yang dapat diterapkan di Indonesia

### **Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam aspek keilmuan bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya dalam sistem perekonomian yang dianut suatu negara, dimana dapat memberikan sumbangan bagi akademisi dalam pengembangan sistem perekonomian yang cocok dengan keadaan negara tersebut.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek praktis bagi Indonesia untuk membentuk suatu sistem ekonomi baru yang menghantarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mencapai tujuannya sesuai Undang Undang Dasar Tahun 1945
3. Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai informasi sekaligus memberikan motivasi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai sistem perekonomian.

## **Dasar Teori**

### **Ekonomi Liberal**

#### **Konsep Ekonomi liberal**

Pengertian konsep ekonomi liberal menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

##### **a. Adam Smith:**

“Sistem ekonomi yang mempunyai kaitannya dengan ‘kebebasan (proses) alami’.”

Meskipun demikian, Smith tidak pernah menggunakan penamaan paham tersebut. Sedangkan konsep kebijakan dari ekonomi (globalisasi) liberal ialah sistem ekonomi bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme.

##### **b. Niccolo Machiavelli (Florence, 1469-1527)**

“Secara ekstensif pada kebutuhan individu sebagai suatu karakteristik yang penting sebagai pemerintahan yang stabil. Dimana sebaik-baiknya kebebasan individu masih perlu dilindungi oleh legitasi serta regulasi yang baik dari pemerintah. Dan bahwa orang-orang yang bisa memimpin hukum dengan benar hanyalah orang-orang yang segala ambisi dan keegoisannya bisa dihilangkan dalam memelihara kebebasannya tersendiri.”

##### **c. Desiderius (Belanda, 1444-1536)**

Desiderius tokoh liberal yang dikenal sebagai orang yang berperikemanusiaan. Dia berkata bahwa: “Masyarakat Erasmian melintasi Eropa sampai pada taraf tertentu sebagai jawaban atas pergolakan reformasinya. Ia berhadapan dengan kebebasan berkehendak.”

Dalam karyanya *De Libero Arbitrio Diatriba Sive Collatio* (1524) meneliti dengan kepintaran dan kejeniusannya untuk menghapus keterbatasan hidup sebagai pernyataan atas kebebasan manusia.

### **Ciri Ekonomi Liberal**

Ciri-ciri ekonomi liberal adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang bebas memiliki sumber-sumber produksi termasuk barang modal.
- b. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
- c. Pemerintah tidak melakukan intervensi (campur tangan) secara langsung dalam kegiatan ekonomi

- d. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
- e. Timbul persaingan dalam masyarakat yang dilakukan secara bebas, terutama aktivitas ekonomi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.
- f. Oleh karena persaingan bebas, modal menjadi berperan penting dalam kegiatan ekonomi.
- g. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar dan pasar merupakan dasar dari setiap tindakan ekonomi.

Beberapa kebaikan dari konsep ekonomi liberal, antara lain:

- a. Setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
- b. Menumbuhkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah / komando dari pemerintah.
- c. Muncul barang-barang yang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat sehingga barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran.
- d. Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif ekonomi.

Beberapa kelemahan dari ekonomi liberal, antara lain:

- a. Pemilik sumber daya produksi atau pemilik modal mengeksploitasi golongan pekerja. Sehingga orang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
- b. Monopoli yang dilakukan perusahaan dapat merugikan masyarakat.
- c. Sulit melakukan pemerataan pendapatan.
- d. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena pengalihan sumber daya oleh individu sering salah.
- e. Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat jika birokratnya korupsi

## **Ekonomi Sosialis**

Pengertian Ekonomi Sosialis

**Pengertian Sistem Ekonomi Sosialis** adalah individu tidak berhak dalam kepemilikan atas harta benda atau kekayaan serta penggunaannya. Kepemilikan atas harta dan kekayaan sepenuhnya berada pada negara. Dalam sistem ekonomi sosialis, kepemilikan harta benda ditentukan oleh negara. Dengan demikian hak individu terhadap sesuatu harta dan kekayaan hanya menerima sejumlah keperluan yang ditentukan oleh negara. Oleh karena itu, segala aktivitas produksi dan distribusi ditentukan oleh negara.

**Dalam sistem ekonomi sosialis**, kebersamaan sosial dan ekonomi masyarakat sepenuhnya diatur secara penuh oleh negara. Manusia secara individu merupakan bagian dari

sosial dan secara keseluruhan dari manusia ini melakat kebersamaan dalam produksi dan ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama secara lebih meluas. Pada sistem ekonomi sosialis terlihat hak-hak individu benar-benar dibatasi dan tidak terdapat kesempatan yang maksimal atau layak optimal bagi masyarakat untuk berkreasi dan untuk mengadakan kegiatan produksi di masyarakat. Akses kepada sosial dalam sistem ini sangat kuat dan segala kebutuhan dan keinginan masyarakat atas suatu barang atau jasa dikontrol dan diatur serta dikendalikan oleh negara.

**Prinsip etika bisnis sistem ekonomi sosialis**, sebenarnya bertujuan secara umum sesuai dengan tujuan etika bisnis yang memang cukup berat dan mengutamakan tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat banyak dan secara kolektif tujuan kesejahteraan itu ingin dicapai secara ideal atau harmonis. Akan tetapi dalam aplikasinya sistem ekonomi sosialis justru menimbulkan distorsi-distorsi dalam alokasi sumber daya ekonomi secara maksimal bagi masyarakat luas. Hal ini terjadi akibat para individu tidak dapat secara optimal untuk mengembangkan diri dan kehilangan semangat dan gairah untuk meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, di dalam sistem ekonomi sosialis, individu di dalam masyarakat kurang bergairah dalam menjalankan profesionalismenya karena kepuasan yang diterimakan oleh negara tidak layak dan penuh pembatasan yang diperlukan oleh negara kepada mereka.

Ekonomi sosialis memiliki beberapa prinsip dasar, diantaranya adalah otoritas suatu negara untuk menguasai semua aset masyarakat. Di sini regulasi seputar ekonomi serta kepemilikan harta dilakukan oleh pemerintah. Prinsip lain adalah kesetaraan ekonomi. Maksudnya, masyarakat tidak bekerja untuk pribadi, mereka hanyalah pegawai pemerintah yang gajinya berasal dari keringat mereka sendiri. Prinsip lainnya adalah tentang disiplin politik. Di negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, parlemen sebagai lembaga yang berhak membuat konstitusi dan regulasi dikuasai oleh kaum proletarian atau kaum buruh. Mereka ditempatkan oleh partai-partai guna membuat regulasi yang cenderung berpihak pada kaum buruh sebagai representasi kaum sosialis.

### **Ciri Ekonomi Sosialis**

Ciri-ciri sistem ekonomi Sosialis ialah:

- a. Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
- b. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka.
- c. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
- d. Peran pemerintah sangat kuat
- e. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.
- f. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

## Prinsip Sistem Ekonomi Sosial

- a. Pemilikan Harta oleh Negara
- b. Kesamaan Ekonomi
- c. Disiplin Politik

## Kelebihan Dan Kelemahan Ekonomi Sosialis

Kelebihan Sistem Ekonomi Sosial adalah:

- a. Disediakkannya kebutuhan pokok
- b. Didasarkan perencanaan Negara
- c. Produksi dikelola oleh Negara

Kelemahan Sistem Ekonomi Sosial adalah:

- a. Sulit melakukan transaksi
- b. Membatasi kebebasan
- c. Mengabaikan pendidikan moral

## Ekonomi kerakyatan

### Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Pengertian konsep ekonomi kerakyatan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

#### **a. Prof. Dr. Mubyarto, Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM**

“Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh–sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan–hubungkansentra–sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentara dan pelaku usaha masyarakat.”

Ekonomi rakyat adalah kegiatan atau mereka yang berkecimpung dalam kegiatan produksi untuk memperoleh pendapatan bagi kehidupannya. Mereka itu adalah petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain, yang modal usahanya merupakan modal keluarga yang kecil, dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Tekanan dalam hal ini adalah pada kegiatan produksi, bukan konsumsi, sehingga buruh pabrik tidak masuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit produksi yang lebih luas yaitu pabrik atau perusahaan, meskipun

sebagian yang dikenal sebagai UKM (Usaha Kecil Menengah) dapat dimasukkan ekonomi rakyat, namun sebagian besar kegiatan ekonomi rakyat tidak dapat disebut sebagai "usaha" atau "perusahaan" (firma) seperti yang dikenal dalam ilmu ekonomi perusahaan.

#### **b. Bung Hatta**

Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut:

"Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31)."

#### **c. Alfred Masrshall**

*"Economics is a study of men as they live and move and think in the ordinary business of life. But it concerns itself chiefly with those motives which affect, most powerfully and most steadily, man's conduct in the business part of his life."* (Alfred Marshall, Principles of Economic, Macmillan, 1948, op.cit. hal 14).

#### **d. Konvensi ILO169 tahun 1989**

Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi subsisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan kerajinan tangan dan industri rumahan.

Semua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.

### **Tujuan Ekonomi Kerakyatan**

Tujuan yang akan dicapai dari penguatan ekonomi kerakyatan adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya mengenai:

- a. Perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (pasal 33 ayat 1 UUD 1945).
- b. Perwujudan konsep Trisakti "Berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang kebudayaan."
- c. Perwujudan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara (pasal 33 ayat 2 UUD 1945).



- d. Perwujudan amanat bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

Adapun tujuan khusus yang akan dicapai adalah untuk:

- a. Membangun Indonesia yang berkedaulatan secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- c. Mendorong pemerataan pendapatan rakyat.
- d. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

### **Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia**

Sebelum mengetahui sistem ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia terlebih dahulu kita mengetahui sistem perekonomian yang pernah terjadi di Indonesia.

#### **Orde lama**

Pada masa orde lama di bagi menjadi tiga masa yaitu:

##### **a. Pasca Kemerdekaan (1945-1950)**

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah mata uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Selain banyaknya mata uang yang beredar, keadaan ekonomi keuangan yang amat buruk juga disebabkan adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI, kas negara yang kosong, dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

##### **b. Demokrasi Liberal (1950-1957)**

Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan *laissez faire laissez passer*. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain:

- 1) Gunting Syarifuddin yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang beredar.
- 2) Progam Benteng (Kabinet Natsir) yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong impotir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya

pada importir pribumi. Selain itu memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi, agar dapat berpartisipasi dengan perkembangan ekonomi nasional. Namun, usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi (Cina).

- 3) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 lewat UU 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
- 4) Sistem Ekonomi Ali-Baba (Kabinet Ali Sastroamijoyo I) yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

### **c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1867)**

Sebagai akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur oleh pemerintah).

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah di masa ini antara lain:

1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai mata uang antara lain uang kertas pecahan Rp 500,00 menjadi Rp50,00 dan uang Rp 1000,00 menjadi Rp 100,00.
2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian di Indonesia.
3. Pemerintah tidak menghemat pengeluarannya malah banyak melaksanakan proyek-proyek mercusuar.

Kebijakan-kebijakan di atas belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia dan ini merupakan salah satu akibat karena menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang lainnya.

### **Orde baru**

Setelah melihat pengalaman masa lalu, di mana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi Demokrasi Pancasila.

Di bawah kekuasaan Soeharto (1965-1998), Indonesia menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostow yaitu:

1. Tahap Pertama : Masyarakat Tradisional.
2. Tahap Kedua : Pra Kondisi untuk Tinggal Landas.
3. Tahap Ketiga : Tinggal Landas.

4. Tahap Keempat : Menuju Kedewasaan.
5. Tahap Kelima : Konsumsi Massa Tinggi

Hal ini terbukti adanya pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan PELITA (Pembangunan Lima Tahunan). Hasilnya pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat, dan industrialisasi meningkat pesat. Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, penumpukan utang luar negeri, dan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat dengan KKN. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Namun, pada tanggal 21 Mei 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang membuat turunnya presiden Soeharto. Indonesia belum sempat menuju tahap Tinggal Landas malah kemudian meninggalkan landasannya hingga lupa pijakan ekonominya dan menjadi tidak sesuai rencana.

### **Orde reformasi**

Pada masa reformasi juga dapat dibagi sebagai berikut:

1. Masa Kepemimpinan BJ. Habibie

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-muver yang cukup tajam dalam ekonomi.

2. Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid

Di masa ini belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwarisi dari orde baru antara lain masalah KKN, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukan diganti oleh Megawati.

3. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

- b. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5.8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- c. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN diprivatisasi, dijual ke perusahaan asing.

4. Masa Kepemimpinan SBY-JK

Kebijakan kontroversial pertama SBY adalah mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakki oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu kebijakan kontroversial kedua yakni BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak mendapatkannya. Ada yang mengaku masyarakat miskin sehingga menerima BLT tersebut, serta sistem pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Pada bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utangnya pada IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun, wacana untuk berhutang lagi ke luar negeri kembali mencuat setelah laporan bahwa kesenjangan ekonomi antar penduduk kaya dan miskin menjadi tajam dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa di bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih kurang (perbankan masih suka menyimpan dan di SBI), sehingga kinerjanya kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu birokrasi pemerintah terlalu kental sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja negara dan daya serap. Jadi di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tetapi di pihak lain kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

## **Analisa literatur**

### **Perbandingan ekonomi kerakyatan dan ekonomi liberal**

Ekonomi kerakyatan sangat berbeda dari neoliberalisme. Neoliberalisme adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun dan dijalankan di atas tiga prinsip sebagai berikut:

- a. tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-secukupnya di pasar;
- b. kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan
- c. pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961).

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam perkembangannya, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi;
- b. liberalisasi sektor keuangan;
- c. liberalisasi perdagangan; dan
- d. pelaksanaan privatisasi BUMN (Stiglitz, 2002).

Sedangkan ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

- a. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;

- b. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan
- c. bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut:

- a. mengembangkan koperasi
- b. mengembangkan BUMN;
- c. memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- d. memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- e. memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Mencermati perbedaan mencolok antara ekonomi kerakyatan dengan neoliberalisme tersebut, tidak terlalu berlebihan bila disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah antitesis dari neoliberalisme. Sebab itu, neoliberalisme, ekonomi negara kesejahteraan (*Keynesianisme*) dan ekonomi pasar.

Pertama-tama, istilah ekonomi kerakyatan tidak dikenal dalam literatur ekonomi dan ekonomi politik. Yang terdapat dalam pembahasan ekonomi adalah kategorisasi suatu populasi berdasarkan pendapatannya. Maka, kemudian dikenal adanya masyarakat berpendapatan tinggi atau kaya dan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Kedua, berdasarkan kategori tersebut kemudian dibuat analisis dampak dari suatu kebijakan ekonomi terhadap masyarakat yang tingkat pendapatannya berbeda. Hasilnya, dampak kebijakan ekonomi dirasakan berbeda-beda pada kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan, gender, dan umur. Bayangkan suatu kebijakan ekonomi dalam bidang pertanian. Ada dua kelompok petani yaitu yang kaya dan yang miskin. Petani yang lebih kaya dapat mengadopsi bibit baru dan meningkatkan produksinya. Dan karena produksi meningkat, harga cenderung turun. Sementara itu, petani miskin tidak dapat membeli bibit baru sehingga produksinya tidak bertambah dan pendapatannya tetap atau bahkan berkurang. Dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan suatu kebijakan ekonomi akan memberikan dampak yang berbeda terhadap dua kategori masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tidak sama.

Pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi tidak mengubah ketimpangan, karena proporsi manfaat pertumbuhan dirasakan sama oleh masyarakat kaya dan miskin. Sumber daya masyarakat miskin terbatas, maka tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi kemudian lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kaya karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya. Dari kenyataan tersebut kemudian dirumuskan suatu kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Tujuannya, agar kelompok ini dapat menikmati pertumbuhan ekonomi secara lebih baik dan mereka juga dapat lebih jauh terlibat dalam aktivitas ekonomi. Inilah yang dikenal sebagai *pro-poor growth* (kebijakan

pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin). Intinya, kebijakan ini berupaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih berpihak secara jelas. Pro-poor growth sengaja dirancang untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat miskin untuk terlibat dan menikmati hasil pembangunan. Caranya dengan melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi, agar mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi.

### **Ekonomi Indonesia saat ini**

Selain itu, kebijakan ini memerlukan dukungan politik yang kuat karena biasanya menyangkut sektor publik yang menyedot dana besar seperti bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, akses kredit atau modal, dan promosi UMKM. Di sini kita ambil contoh yaitu masalah:

#### **1. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)**

UMKM sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.

Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Selain itu, UMKM selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh para politisi dalam menarik simpati massa.

Sebagai poros kebangkitan perekonomian nasional UMKM ternyata bukan sektor usaha yang tanpa masalah. Selain masalah permodalan yang disebabkan sulitnya memiliki akses dengan lembaga keuangan karena ketiadaan jaminan (collateral), salah satu masalah yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar.

Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar UMKM di Indonesia dengan segala keterbatasannya dapat berkembang, perlu dukungan berupa pelatihan dan penyediaan fasilitas. Tentu saja tanggung jawab terbesar untuk memberikannya adalah pemerintah.

Salah satu gagasan adalah perlunya dibuat pusat komunikasi bisnis berbasis web di setiap daerah untuk memfasilitasi UMKM dalam mengembangkan jaringan usahanya. Pusat komunikasi bisnis berbasis web ini perlu dibangun di setiap kabupaten atau di setiap kecamatan. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa sebagian besar UMKM berlokasi di desa-desa dan kota-kota kecamatan, serta belum mampu untuk memiliki jaringan internet sendiri apalagi memiliki website. Sementara untuk pengembangan usaha dengan akses pasar global harus memanfaatkan media virtual. Pusat komunikasi bisnis berbasis web ini akan memudahkan UMKM dalam memperluas pasar baik dalam negeri maupun luar negeri dengan waktu dan biaya yang efisien. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat UMKM

dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya akan meningkat dan secara bersinergi akan berdampak positif terhadap keberhasilan pembangunan nasional.

## 2. Pendidikan

Kebijakan mendorong pendidikan tidak dapat dinikmati secara cepat. Program pendirian sekolah secara massif pada 1970-an terbukti memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sumber daya manusia. Untuk setiap sekolah dasar yang didirikan bagi 1.000 anak, berhasil ditingkatkan rata-rata tingkat pendidikan dari 0,12 menjadi 0,19 (Duflo, 2001). Peningkatan diikuti peningkatan pendapatan dari 1,5 menjadi 2,7. Intinya, bertambahnya tingkat pendidikan meningkatkan pendapatan, karena tingkat pengetahuan dan keterampilan meningkat.

Kebijakan ekonomi akan berpihak kepada rakyat miskin, jika pemerintah memberikan alokasi lebih banyak dalam bidang pendidikan dan juga secara khusus menyusun kebijakan pendidikan bagi masyarakat miskin, sehingga dapat dikatakan pemerintah sudah mengadopsi kebijakan yang memihak masyarakat miskin. Kebijakan dalam pendidikan ini akan lebih baik lagi jika didukung oleh kebijakan lainnya dalam bidang peningkatan nutrisi bagi masyarakat miskin.

Bagi masyarakat miskin, kecukupan nutrisi masih menjadi barang mewah. Padahal kebutuhan nutrisi yang minimum amat diperlukan agar anak-anak miskin dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tanpa nutrisi yang baik, konsentrasi anak-anak miskin tidak bertahan lama. Kebijakan ekonomi yang memihak masyarakat miskin mesti dijalankan dengan serius dan bukan sekadar slogan politik. Bantuan yang sifatnya karitatif tidak akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Negeri ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin yang komprehensif, karena dua alasan penting yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan meningkatnya kualitas SDM, dan memperkecil ketimpangan.

### **Ekonomi Indonesia masa depan**

Berkaitan dengan uraian diatas, agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, sejumlah agenda konkret ekonomi kerakyatan harus segera diangkat kepermukaan. Secara garis besar ada lima agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera diperjuangkan. Kelima agenda tersebut antara lain:

- a. Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek KKN.
- b. Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme.
- c. Persaingan yang berkeadilan (*fair competition*).
- d. Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.
- e. Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap.
- f. Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan.

## **Pembahasan**

### **Optimalisasi dana desa dan restrukturisasi badan usaha**

Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan, pengaturan Dana Desa di dalam UU tersebut masuk melalui pembahasan keuangan desa. Dalam pasal Pasal 71 ayat (1), yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa.

Dalam dalam pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yg bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dasar pengalokasian inilah yang seharusnya tersampaikan secara sempurna kepada seluruh aparat desa yang nantinya akan mengelola. Dengan demikian seluruh desa di Indonesia akan menerima alokasi secara beragam sesuai kondisi dan karakteristik masing-masing. Dana desa wajib juga wajib ditujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok.

Kegiatan pembangunan dan pemerataan antar desa, akan dilakukan melalui skema penataan desa. Penataan desa ini nantinya akan ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus meningkatkan daya saing desa. Upaya tersebut akan difasilitasi melalui berbagai kemungkinan melakukan penghapusan desa, pembentukan desa, penggabungan desa, perubahan status desa dan penyesuaian kelurahan. Dengan menggunakan asumsi data jumlah desa tahun 2014 sebanyak 72.944 desa, maka tiap tiap desa diperkirakan akan mengelola dana sebesar Rp1,4 miliar.

Di sisi lain berbagai sistem perekonomian yang ada dan diterapkan diberbagai negara sementara ini ternyata menimbulkan permasalahan termasuk di Indonesia, kapitalisme tanpa disadari terjadi diseluruh belahan dunia, permasalahan buruh dan pemodal serta kebijakan kebijakan pemerintah disetiap negara selalu menimbulkan konflik yang tidak ada akhirnya. Dengan demikian kesempatan adanya dana desa menjadi hal positif, dan berbagai keragaman



sumber daya yang ada di setiap desa perlu disikapi sebagai keunggulan kompetitif bagi daerahnya, yang semestinya dapat dioptimalkan.

Berbagai sistem perekonomian yang dibahas sebelumnya memberikan suatu pemikiran untuk melakukan suatu perubahan sistem perekonomian dengan memperhatikan keterkinian kebijakan pengelolaan keuangan negara dan keunggulan kompetitif di setiap daerah. Sistem perekonomian baru tersebut bukan sekedar konsep tetapi dapat dimulai dan diimplementasikan bertahap sesuai paket kebijakan ekonomi yang diberlakukan pada pemerintahan sekarang.

Dengan memanfaatkan dana desa tersebut dan dana yang dialokasikan di kelurahan dibentuk di setiap Rukun Warga (RW) satu Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Permodalan awal BUMR dengan mengalokasikan sekitar 70 persen dari dana desa kepemilikannya untuk setiap penduduk di Rukun Warga tersebut. Hal ini akan sejalan dengan penataan administrasi kependudukan dan kepentingan administrasi pemerintahan lainnya misalnya kepentingan untuk data perpajakan pusat atau daerah dan sebagainya. Permodalan selanjutnya dalam BUMR maksimal dapat dimiliki oleh Badan Hukum yang ada di wilayah RW tersebut sebesar 30 persen, dengan maksimal kepemilikan per badan hukum yang ada sebesar 5 persen.

Modal awal yang ada dan dikelola oleh BUMR 30 persen diinvestasikan di Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang dibentuk satu BUMD di setiap desa dan kelurahan, selebihnya dana di BUMR dijadikan modal usaha. Permodalan selanjutnya BUMD yang ada di setiap desa dan kelurahan dapat dimiliki maksimal 30 persen oleh badan hukum yang ada di wilayah Desa atau kelurahan dengan kepemilikan maksimal tiap badan hukum adalah 5 persen. Modal awal yang ada dan dikelola oleh BUMR 30 persen diinvestasikan di Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang dibentuk satu BUMD di setiap desa dan kelurahan, selebihnya dana di BUMR dijadikan modal usaha. Permodalan selanjutnya BUMD yang ada di setiap desa dan kelurahan dapat dimiliki maksimal 30 persen oleh badan hukum yang ada di wilayah Desa atau kelurahan dengan kepemilikan maksimal tiap badan hukum adalah 5 persen.

Modal awal yang ada dan dikelola oleh BUMD 30 persen diinvestasikan di Badan Usaha Milik Kecamatan (BUMK) yang dibentuk satu BUMK di setiap kecamatan, selebihnya dana di BUMK dijadikan modal usaha. Permodalan selanjutnya BUMK yang ada di kecamatan dapat dimiliki maksimal 30 persen oleh badan hukum yang ada di wilayah Kecamatan dengan kepemilikan maksimal tiap badan hukum adalah 5 persen. Modal awal yang ada dan dikelola oleh BUMK 30 persen diinvestasikan di Badan Usaha Milik Kabupaten Kota (BUMK2) yang dibentuk satu BUMK2 di setiap kabupaten atau Kota, selebihnya dana di BUMK2 dijadikan modal usaha. Permodalan selanjutnya BUMK2 yang ada di setiap kabupaten atau kota dapat dimiliki maksimal 30 persen oleh badan hukum yang ada di wilayah kabupaten atau kota dengan kepemilikan maksimal tiap badan hukum adalah 5 persen. Modal awal yang ada dan dikelola oleh BUMK2 30 persen diinvestasikan di Badan Usaha Milik Provinsi (BUMP) yang dibentuk satu BUMP di setiap provinsi, selebihnya dana di BUMP dijadikan modal usaha. Permodalan selanjutnya BUMP yang ada di setiap provinsi dapat dimiliki maksimal 30 persen oleh badan hukum yang ada di provinsi dengan kepemilikan maksimal tiap badan hukum adalah 5 persen.

Modal awal yang ada dan dikelola oleh BUMD 30 persen diinvestasikan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 untuk industri barang, jasa dan perdagangan yang bersifat strategis. Permodalan selanjutnya BUMN yang ada dapat dimiliki maksimal 30 persen oleh badan hukum yang ada di Indonesia kepemilikan maksimal tiap badan hukum adalah 5 persen.

### **Jenis usaha dan sistem ekonomi Indonesia baru**

Diperlukan suatu penataan Badan Usaha yang dibentuk dengan mempertimbangkan keunggulan kompetitif setiap daerah sebagai berikut:

- 1) BUMR, jenis usaha yang diprioritaskan adalah perdagangan dan home industri barang dan atau dengan orientasi pada keunggulan sumber daya yang ada diwilayahnya.
- 2) BUMD, jenis usaha yang diprioritaskan adalah produk pertanian perikanan serta perkebunan khususnya sembilan bahan pokok dan sebagai agen dari Produk BUMK, BUMK2.
- 3) BUMK, jenis usaha yang diprioritaskan adalah industri skala menengah kecil dengan orientasi pada keunggulan sumber daya di kecamatan masing masing dan sebagai distributor dari hasil produksi BUMK2, BUMD, serta BUMN untuk wilayah kecamatan.
- 4) BUMK2, jenis usahanya yang diprioritaskan adalah industri skala menengah dengan orientasi pada sumber daya yang ada, termasuk diantaranya industri property serta berfungsi sebagai pengendalian strategi jenis usaha di BUMK. BUMD dan BUMR.
  - i. BUMD, jenis usaha yang diprioritaskan adalah industri skala besar dan beorientasi pada ekspor setelah kebutuhan lokal terpenuhi, misalnya untuk kendaraan bermotor, mesin, dan sebagai main distributor dari BUMN untuk wilayah provinsinya
  - ii. BUMN, jenis usahanya diprioritaskan industri strategis.

Hal penting yang perlu dirumuskan adalah merestrukturisasi BUMN dan BUMD yang ada sekarang ke dalam sistem perekonomian ini.

Dengan sistem perekonomian ini memberikan hal hal positif sebagai berikut ;

1. Ketahanan Negara disektor ekonomi akan kuat karena rakyat secara semesta dan bahu membahu membangun perekonomian.
2. Persaingan dapat dikendalikan secara sehat, dan produk produk yang dihasilkan yang diorientasikan ekspor akan lebih berkualitas dan memiliki daya saing di pasar internasional.
3. Meminimalisasi konflik perburuhan, pengupahan dan sebagainya karena rakyat secara langsung memiliki perusahaan.
4. Kebijakan Fiskal lebih mudah, mekanisme perpajakan pusat dan daerah lebih terkontrol.
5. Membantu tatakelola dan administrasi kementrian dan lembaga lainnya terutama untuk kebutuhan akan informasi.
6. Sejalan dengan revolusi mental yang dilaksanakan pemerintah.

Kendala yang dihadapi dalam implemenasi sistem perekonomian ini.

1. Proses perubahan dari sistem akan membutuhkan energi yang besar dan keihklasan bagi para penyusun.
2. Penolakan bagi para penguasa perekomian yang sekarang.
3. Sosialisasi kepada masyarakat

## **Simpulan dan saran**

### **Simpulan**

- a. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa maka dapat dilakukan langkah dengan mengalokasikan dana di kelurahan dengan membentuk satu Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) di setiap Rukun Warga (RW). Permodalan awal BUMR diperoleh dengan mengalokasikan sekitar 70 persen dari dana desa untuk kepemilikan setiap penduduk di Rukun Warga tersebut. Selanjutnya 30 persen-nya dinvestasikan di Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang dibentuk satu BUMD di setiap desa dan kelurahan. Modal awal yang ada dan dikelola oleh BUMD 30 persen-nya dinvestasikan di Badan Usaha Milik Kecamatan (BUMK) yang dibentuk satu BUMK di setiap kecamatan. Modal awal yang ada dan dikelola oleh BUMK 30 persen dinvestasikan di Badan Usaha Milik Kabupaten Kota (BUMK2) yang dibentuk satu BUMK2 di setiap kabupaten atau Kota. Dan modal awal yang ada dan dikelola oleh BUMK2 30 persen dinvestasikan di Badan Usaha Milik Provinsi (BUMP). Modal awal yang ada dan dikelola oleh BUMP, 30 persen dinvestasikan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 untuk industri barang, jasa dan perdagangan yang bersifat strategis.
- b. Sistem ekonomi baru yang tepat diterapkan di Indonesia memerlukan suatu penataan Badan Usaha yang dibentuk dengan mempertimbangkan keunggulan kompetitif setiap daerah. Satu hal penting yang perlu dirumuskan adalah merestrukturisasi BUMN dan BUMD yang telah ada sekarang ke dalam sistem perekonomian ini.

### **Saran**

Sebagaimana halnya memperkenalkan sebuah inovasi maka proses perubahan dari sistem akan membutuhkan energi yang besar dan keihklasan bagi para penyusun kebijakan. Untuk itu perlu disiapkan langkah-langkah sosialisasi yang tepat guna menghadapi penolakan bagi para penguasa perekomian yang sekarang, serta kepada masyarakat selaku aktor utama dalam sistem ekonomi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abimanyu, Anggito. 2000, *Ekonomi Indonesia Baru, kajian dan alternatif solusi menuju pemulihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Alfred Marshall, *Principles of Economic*, Macmillan, 1948
- Baswir, Revrisond (1995), *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, dalam Baswir (1997), *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Baswir, Revrisond, 2008. *Ekonomi Kerakyatan: Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia*, dalam (Sarjadi dan Sugema eds.) *Ekonomi Konstitusi*. Jakarta: Sugeng Sarjadi Syndicate.
- Baswir, Revrisond, Drs, MBA, *Ekonomi Kerakyatan VS Neoliberalisme*, <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm>, diunduh 25 November 2015
- Duflo, 2001
- Fedrik Benu. 2002. *Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Suatu Kajian Konseptual*. Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Univ. Nusa Cendana. Kupang.
- Giersch, 1961
- <http://baiqidian.wordpress.com/2011/06/15/ekonomi-kelembagaan/>
- <http://cdsindonesia.wordpress.com/2013/01/15/upaya-mewujudkan-ekonomi-kerakyatan-berbasis-potensi-lokal-kabupaten-tasikmalaya/>
- <http://www.bi.go.id>
- <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/index.php/page/load/21>
- Kleden, Ignas. 2000, *Persepsi dan Mispersepsi tentang Pemulihan Ekonomi Indonesia, Pokok-Pokok pikiran dalam Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Lekacman, Robert dan Van Lonn, Boriin.2010*Kapitalisme, Teori dan Perkembangannya*. Bandung;Resist Book
- Lekacman, Robert dan Van Lonn, Boriin.2010*Kapitalisme, Teori dan Perkembangannya*. Bandung;Resist Book
- Mubyarto (1979), *Gagasan dan Metode Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 19 Maret 1979)*
- Prawirokusumo, Soeharto. 2001, *Ekonomi Rakyat, Kosep, Kebijakan, dan Strategi*, BPF, Yogyakarta
- Tara, Azwir Dainy, 2001, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat, Nuansa Madani*, Jakarta
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa